

**Pengaruh Kompetensi Sistem Pengendalian Internal
Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
Terhadap Akuntabilitas Pada Kantor
Desa Di Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng.**

Wini Novianti Cendrana¹, H. Baso R², Ujianti Tawakkal³

¹Program Studi Akuntansi, Fokultas Ekonomi, Universitas Wira Bhakti

¹ wininoviantic@gmail.com

² basoranungkalobe@gmail.com

³ Tawakkalujianti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keterampilan kerangka pengaturan instansi dan sifat penyampaian pendanaan terhadap tanggung jawab pada instansi-istansi pejabatan daerah di Bagian Bissappu, Bantaeng. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe eksplorasi secara kuantitatif dengan strategi pengujian terhadap data yang diperoleh sebagai penelitian kuantitatif. Pengujian kuantitatif meliputi uji keteguhan, uji kewajaran, dan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi, uji koefisien determinasi meliputi uji F dan uji T. Metode pengujian data yang digunakan diketahui bahwa regresi linier berganda yang memiliki kemampuan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Sesuai hasil pengujian hipotesis simultan dan parsial diperoleh bahwa variabel dependen dan variabel dependen berhubungan terhadap variabel dependen pada Istansi Camat Wilayah Bissappu Bagian Bantaeng. Aturan .

Kata Kunci : Pengaturan Istansi, Kelayakan Penyampaian Pendanaan Akuntabilitas Istansi Daerah.

ABSTRACT

The motivation behind this study is to decide and dissect the Impact of Inside Control Framework Skill and Nature of Monetary Report Show on Responsibility at Town Workplaces in Bissappu Locale, Bantaeng Rule . The technique utilized in this examination utilizes the exploration type quantitatively with examination strategies on the information got as quantitative investigation. Quantitative examination incorporates unwavering quality tests, ordinariness tests, and multicollinearity, heteroscedasticity test, relapse investigation test, coefficient test assurance incorporates the F test and the T test. The information examination methods utilized are different straight relapse investigation what capabilities to demonstrate the speculation study. In light of the consequences of concurrent and halfway speculation estimations, it was gotten that responsibility and quality impact Responsibility at the Town Office in Bissappu Locale, Bantaeng Rule .

Keywords : Istansi Control, Quality of Village Office Accountability Financial Reports.

PENDAHULUAN

Akuntansi pejabatan merupakan bagian akuntansi yang menghabiskan banyak waktu dalam pencatatan dan pepenyampaian transaksi yang terjadi di dalam organisasi pejabatan. Dengan tuntutan tanggung jawab dan kejujuran dalam pencatatan transaksi dan penyampaian proses pejabatan, maka orang-orang yang berkecimpung di bagian ini menjadikan akuntansi pejabatan sebagai kebutuhan yang saat ini tidak agar diabaikan (Siahaan dan Simanjuntak , 2001)

Sesuai Peraturan Urutan 17 Masa 2003 tentang Pendanaan Bangsa, pendanaan bangsa diketahui bahwa segala kekayaan dan kewajiban suatu bangsa yang agar diangka dengan uang, atau segala sesuatu, misalnya alat-alat yang agar dimiliki oleh bangsa yang berhubungan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban. Hakikat penyampaian pendanaan pejabat juga terkait erat dengan Pedoman Akuntansi Pejabat (SAP). Oleh karena itu, pengaturan instansi perlu diperiksa dan diangka agar manfaat pengaturan instansi tersebut efektif dan agar dipertanggungjawabkan. (Damayanti , 2001)

Kerangka Pengawasan Istansi (SPIP) dilaksanakan di seluruh pejabat pusat dan legislatif daerah. Kerangka pengawasan instansi pejabat daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu PP Urutan 60 Masa 2008: (1) iklim pengawasan, (2) evaluasi risiko, (3) aktifitas pengawasan, (4) data dan interaksi, (5) pengawasan instansi. (Mita , 2001)

Kurangnya pengawasan instansi pada beberapa koperasi di Wilayah Payangan juga mengakibatkan pekerja berpeluang bertindak merugikan yang agar merugikan instansi. Untuk mewujudkan proses yang baik dalam suatu instansi agar diukur dari hasil tugas yang telah diselesaikan oleh pekerja dibandingkan dengan pokok yang telah ditetapkan oleh instansi, karena keberhasilan suatu instansi dipengaruhi oleh proses pekerja. Proses merupakan hasil tugas yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kewajibannya . (Damayanti , 2001)

Kerangka akuntansi moneter diketahui bahwa kerangka akuntansi yang menggabungkan interaksi

pencatatan , pengelompokan, penguraian, penkeseluruhan transaksi atau kejadian moneter dan perincian moneter berkenaan dengan pelaksanaan rencana pengeluaran penagaran dan konsumsi daerah (APBD). sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Tidak Resmi Urutan 71 Masa 2001 tentang Pokok-Pokok Akuntansi Pejabatan. Penyusunan penyampaian moneter yang diarahkan oleh pokok-pokok akuntansi pejabat diketahui bahwa dengan memperhatikan hakikat penyampaian moneter, sehingga penyampaian moneter yang dirujuk agar meningkatkan keabsahannya dan dengan demikian akan benar-benar agar mengakui adanya transparansi dalam pengelolaan pendanaan pejabat daerah. Dengan demikian, pengelolaan yang baik agar terwujud. (Baso R et al., 2002)

Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus penipuan di setiap daerah, salah satunya di Bali misalnya kasus penipuan yang terjadi di LPD Pacung , Wilayah Bitera , Bagian Gianyar yang diangka bersalah secara hukum karena melibatkan dana LPD untuk kepentingan pribadi dan divonis 1,5 masa penjara di Pengadilan Negeri Denpasar. Kejahatan penipuan terjadi karena adanya segitiga penipuan yang meliputi tekanan, peluang dan dukungan. Tekanan merupakan alasan untuk bertindak dan menyembunyikan tindakan penipuan. (Basri , 2001) menyatakan bahwa pelaku yang bertindak penipuan dan mencuri dana karena tekanan yang sedang menyimpannya, misalnya tuntutan hukum yang mendaerakh untuk dipenuhi (tekanan pendanaan).

Metode Analisis

Teknik eksplorasi merupakan salah satu sudut pandang yang memegang peranan penting dalam kesempurnaan atau kemajuan penelitian, dengan menggunakan strategi penelitian yang tepat, pertanyaan-pertanyaan peneliti agar terjawab dan tujuan-tujuan peneliti agar tercapai. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa multiple lapse inspection, yaitu suatu metodologi yang berhubungan dengan prosedur-prosedur kajian sosial seperti wawancara terorganisasi, survei, penelitian terukur, dan sebagainya. Informasi kuantitatif merupakan informasi yang dibingkai dalam angka-angka atau informasi subjektif yang dimunculkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal-hal yang benar-benar ingin Anda fokuskan berkenaan dengan penggambaran sumber informasi secara umum untuk membuatnya lebih mudah bagi analis untuk menggambarkan apa yang terjadi pada sumber informasi dalam audit diamati dari premis sumber informasi dalam arah survei dan persiapan terakhir. Kelayakan-kelayakan ini normal seperti kesesuaian sumber informasi. dalam survei karena memengaruhi siklus perolehan informasi, sedangkan sebagai metode untuk mengelola sudut pandang yang berkembang, jelas berbeda saat mengobrol dengan wanita dan pria. Demikian pula, bila diamati dari premis instruktif mengingat pada dasarnya berbagai individu memiliki karakter yang berbeda, jelas mereka juga bervariasi dalam cara mereka menyampaikannya. Berbagai macam jawaban bergantung pada ikhtisar yang dilingkari ke sumber informasi. Dari 94 survei yang disebarkan ke instansi-instansi daerah di Bissappu sub-area sebagai sumber data, teragar 94 sumber data yang agar diakui dan dituju dalam jajak penagar. Informasi yang dikumpulkan dari konsekuensi tanggapan jajak penagar yang disampaikan kepada sumber data diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 5.1 *Distribusi Jenis Kelamin Sumber data*

| Jenis kelamin | Keseluruhan | Persentase (%) |
|---------------|-------------|----------------|
| Laki laki | 52 | 55,3% |
| Wanita | 42 | 44,7% |
| Keseluruhan | 94 | 100.1 % |

Sumber : Data primer

Melihat tabel di atas, terlihat bahwa sumber data laki-laki lebih banyak dominan dibandingkan sumber data perempuan, yakni sebanyak 52 sumber data laki-laki (55,3%) dan 42 sumber data perempuan (44,7%).

Tabel 5.2 *Distribusi usia sumber data*

| Usia | Keseluruhan | Persentase (%) |
|-------------|-------------|----------------|
| 20-25 | 28 | 29,8% |
| 26-30 | 23 | 24,5% |
| 31-35 | 15 | 16.1% dari |
| 36-40 | 20 | 21,3% |
| 41-45 | 8 | 8,5% |
| Keseluruhan | 94 | 100.1 % |

Sumber : Data primer

Sesuai tabel 5.2, agar yaitu dari 94 sumber data, sebagian besar berusia 20-25 masa, yakni sebanyak 28 orang (29,8%). Usia 26-30 masa sebanyak 23 orang

(24,4%), usia 31-35 masa sebanyak 15 orang (16.1%), usia 36-40 masa sebanyak 20 orang (21,3%), dan usia 41-45 masa sebanyak 8 orang (8,5%).

Tabel 5.3 Distribusi posisi sumber data

| Posisi | keseluruhan | Persentase (%) |
|------------------------|-------------|----------------|
| Pimpinan daerah | 4 | 4,3% |
| Pimpinan kesejahteraan | 2 | 2,1% |
| Pimpinan Dusun | 1 | 1,1% |
| Sekretaris Daerah | 2 | 2,1% |
| Manajer Perpustakaan | 1 | 1,1% |
| Pimpinan sekolah | 2 | 2,1% |
| Pimpinan Pejabatan | 1 | 1,1% |
| Pimpinan Perencanaan | 1 | 1,1% |
| Staf | 80 | 85,1% dari |
| Keseluruhan | 94 | 100.1 % |

Sesuai tabel 5.3, terlihat dari 94 sumber data yang telah menyelesaikan survei, sebagian besar dari mereka memiliki jabatan sebagai staf, yakni sebanyak 80 orang (85,1%), 4 orang pimpinan daerah (4,3%), 2 orang pimpinan bagian administrasi (2,1%), 1 orang pimpinan daerah (1,1%), 2 orang sekretaris daerah (2,1), 1 orang pimpinan perpustakaan (1,1%), 2 orang pimpinan daerah (2,1%), 1 orang pimpinan pejabatan (1,1%), dan 1 orang pimpinan tata usaha (1,1%).

Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji t ditujukan untuk memutuskan makna tidak lengkap dari pekerjaan antara penyebab-penyebab otonom pada variabel dependen dengan mengharapkan bahwa penyebab-penyebab bebas lainnya dipandang konsisten. (Uji t) konsekuensi dari estimasi ini kemudian dibandingkan dengan tabel t menggunakan kecepatan kesalahan 0.15. Pokok yang digunakan diketahui bahwa sebagai berikut: - H0 diterima jika angka sig atau angka t hitung lebih besar dari Ha ditolak dengan asumsi angka t yang ditentukan > t tabel atau angka sig > α Dengan asumsi H0 diterima, sangat mungkin disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan, sedangkan penolakan H0 menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan.

Tabel 9.1 Uji T Parsial

| Nama variabel | Keseluruhan T | tanda tangan |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Bentuk pengaturan instansi (X1) | 5.505 | .110 |
| Kelayakan penyampaian pendanaan (X2) | 2.793 orang | .106 |

Sumber : Data primer SPSS

t tabel diketahui bahwa sejumlah $(0.15.2 n - k - 1) = (0.15 .2 : 94-3-1 = (0.125:90)$ sesuai sebaran angka pada t tabel = 1,986 Dari tabel di atas agar kita masukkan, antara lain: 1. Sesuai angka signifikansi: Dari tabel Koefisien, angka t hitung Variabel Bentuk Pengaturan Intern (X1) diketahui bahwa 5,505 t tabel 1,986 dan angka kritisnya diketahui bahwa $0.110 < 0.15$ maka H0 ditolak (menolak Ha) dengan demikian agar disimpulkan bahwa Akuntabilitas pada Istansi Daerah di Wilayah Bissappu dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas. 2. Sesuai angka signifikansi: Angka t hitung dari tabel Koefisien variabel (X2) Kelayakan Penyampaian Pendanaan diketahui bahwa $2,793 \geq t$ tabel 1,986 dan angka kritisnya diketahui bahwa $0.106 < 0.15$ maka H0 ditolak (menoleransi Ha) sehingga agar diduga bahwa variabel kelayakan penyampaian mempengaruhi tanggung jawab di instansi daerahmadya sub-wilayah Bissappu .

Uji F

Aturan untuk menguji spekulasi dengan menggunakan pengukuran F diketahui bahwa jika Angka signifikansi $F < 0.15$ maka pada saat itu diterima dugaan (Ghozali, 2006). Hasil pengujian uji F agar diamati pada bagan di bawah :

Tabel 10.1 Uji F

| Analisis varians | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------------|
| Model | | Keseluruhan Kuadrat | df | Kuadrat Rata-rata | F | Tanda tangan. |
| 1 | Regresi pada | 1814.384 | 2 | 907.192 | 91.989 | .110 juta |
| | sisanya | 887.573 | 90 | 9.862 orang | | |
| | Keseluruhan | 2700.957 | 92 | | | |
| Variabel Dependen: Bentuk pengaturan instansi, Kelayakan penyampaian pendanaan | | | | | | |
| Prediktor: (Konstan): Akuntabilitas di Istansi Daerah di Distrik Bissappu | | | | | | |

Sumber : Data primer SPSS

Mengingat hasil uji F model utama pada bagan, angka F dari 91.989 lebih menonjol dibandingkan angka tabel f sejumlah 3.193 dengan tingkat kepentingan 0.110 atau sebaliknya < 0.15 , jadi sementara itu penyebab tanggung jawab dan keterusterangan mempengaruhi Tanggung Jawab di Istansi Daerah di Daerah Bissappu . Pemeriksaan Relaps Berbeda diketahui bahwa prosedur faktual yang sepanjang waktu mendorong hubungan numerik antara setidaknya dua penyebab bebas selanjutnya, variabel dependen .

Analisis Regresi Berganda

mempengaruhi Tanggung Jawab di Istansi Daerah di Daerah Bissappu . Pemeriksaan Relaps Berbeda diketahui bahwa prosedur faktual yang sepanjang waktu mendorong hubungan numerik antara setidaknya dua penyebab bebas selanjutnya, variabel dependen .

Tabel 14. Analisis Regresi Berganda

| Koefisien a | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Model | Koefisien Tak Terpokokisasi | Koefisien Pokok | T | Tanda tangan |

| | | B | Kesalahan Pokok | Bahasa Inggris | | |
|--|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | (Konstan) | 2.370 orang | 3.462 | | 4.339 | .110 |
| | Kelayakan penyampaian pendanaan | .586 | .106 | .568 | 5.505 | .110 |
| | Bentuk pengaturan instansi | .349 | .124 | .228 | 2.793 orang | .106 |
| a. Variabel Dependen: Akuntabilitas di Istansi Daerah | | | | | | |

Sumber : Data primer SPSS

1 = 24.173 + 2,211(X1) + 2,258 (X2) Keterangan : Y = Variabel Terkait (Tanggung Jawab di Istansi Daerahpraja di Wilayah Bissappu) a = Stabil b = Koefisien Relaps 60 X 1 = Penyebab Bebas (Kerangka Pengaturan Istansi) X 2 merupakan variabel bebas (kelayakan penyampaian pendanaan). a. Angka konsisten variabel Akuntabilitas di Istansi Daerah di Distrik Bissappu diketahui bahwa 24.173 yang ditunjukkan dengan koefisien sejumlah 24.173. b. Sesuai koefisien regresi X1 sejumlah 2,211, untuk setiap Angka bentuk pengaturan instansi akan naik sejumlah 2,211 persen untuk setiap kenaikan satu persen angka akuntabilitas. c. Sesuai koefisien regresi X2 sejumlah 2,258, untuk setiap Angka proses pendanaan naik dengan kenaikan satu persen transparansi sejumlah 2,258.

Koefisien Determinasi

Koefisien Jaminan (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan penyebab bebas terhadap penyebab bawahan dengan angka berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$

Tabel 15. Koefisien Determinasi

| Model musim panas | | | | |
|---|------|------------|----------------------------|--------------------------|
| Model | R | R persegi | R Kuadrat yang Disesuaikan | Kesalahan Pokok Estimasi |
| 1 | .865 | angka .748 | .731 | 1.385 |
| a. Prediktor: (Konstan), Kelayakan penyampaian pendanaan, Bentuk pengaturan instansi | | | | |

Sumber : Data primer SPSS

Sesuai tabel tersebut, pengujian memperoleh angka koefisien keyakinan (R Square) sejumlah 2,748 atau 74,8%. Angka koefisien ini diketahui bahwa tanggung jawab dan kejujuran, yang memengaruhi proses pendanaan sejumlah 74,8%. Sementara itu, sisanya sejumlah 25,2% dipengaruhi oleh penyebab lain yang tidak dianalisis dalam pengujian ini.

Diskusi

Dampak Kerangka Kontrol Istansi (X1) terhadap Tanggung Jawab di Istansi Daerahmadya di Daerah Bissappu (Y) Sesuai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kerangka kontrol instansi mempengaruhi tanggung jawab di Istansi Daerahmadya di Daerah Bissappu . Hal ini dibuktikan dengan angka t hitung sejumlah $5,505 \geq t$ tabel sejumlah 1,986 dan angka signifikansi sejumlah 0.110 yang jauh lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.15). Tanggung jawab merupakan salah satu unsur pelaksana sumber daya dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Istansi Daerahmadya Daerah Bissappu , Rezim Bantaeng . Daerah Bissappu merupakan salah satu penggerak Istansi Daerahmadya yang baik di kalangan pejabat Daerahmadya dan daerah setempat.

Hubungan Sifat Penyampaian Pendanaan (X2) terhadap Tanggung Jawab pada Istansi Perangkat Daerah di Wilayah Bissappu (Y). Hal ini dibuktikan dengan angka t hitung sejumlah $2.793 \geq t$ tabel 1.986 dan angka kritisnya diketahui bahwa 0.106 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.15) Tanggung jawab merupakan salah satu unsur dalam rangka pengembangan lebih lanjut pelaksanaan pendanaan pejabatan instansi perangkat daerah, kelayakan pelayanan sangat diperhatikan dalam pelaksanaan pendanaan pejabatan instansi perangkat daerah. yang melayani masyarakat setempat yang agar merasakan pelayanan yang diberikan oleh unit tugas perangkat daerah instansi perangkat daerah subwilayah Bissappu .

Dampak X1 dan X2 terhadap Y Akibat penyebab-penyebab otonomi yang mempengaruhi penyebab-penyebab terikat diselesaikan dengan memanfaatkan Uji F. Mengingat akibat model Uji F pertama dalam bagan, maka, pada saat itu, angka F sejumlah 91,989 lebih besar dari angka F dalam bagan. sejumlah 3.193 dengan tingkat kepentingan 0.110 atau <0.15 , maka pada saat yang sama penyebab-penyebab kerangka pengaturan instansi dan dampak kelayakan penyampaian moneter mempengaruhi tanggung jawab di Istansi Daerahmadya di Wilayah Bissappu . Sesuai bagan, pengujian memperoleh angka koefisien jaminan (R Square) sejumlah 2,748 atau 74,8%. Pentingnya koefisien ini diketahui bahwa bahwa kerangka pengaturan instansi dan sifat penyampaian moneter mempengaruhi Tanggung Jawab di Istansi Daerahmadya di Wilayah Bissappu sejumlah 74,8 %. Sementara kelebihan 25,2% dipengaruhi oleh penyebab lain yang tidak difokuskan pada pemeriksaan ini.

KESIMPULAN

Mengingat akibat dari konsentrasi Karena Kemampuan Kerangka Pengaturan Istansi dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab pada Istansi Wilayah di Daerah Bissappu , Rezim Bantaeng . maka agar ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerangka pengaturan instansi berdampak positif dan kritis terhadap tanggung jawab di Istansi Daerah di Daerah Bissappu . Hal ini menunjukkan bahwa dengan memperluas pelaksanaan dana pejabat di Bissappu Istansi Wilayah Daerah. Karena sudah diakui masyarakat dalam pelaksanaan pendanaan.
2. Sifat penyampaian pendanaan memiliki dampak (positif) dan luar biasa terhadap Tanggung Jawab di Istansi Daerahmadya di Daerah Bissappu . Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan pendanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
3. Akuntabilitas mempengaruhi instansi daerah sub-area Bissappu

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Permata Sari. (2001). Dampak Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat.

Baso R, Surlianto, dan Asmelisa. (2002). Penerapan Kerangka Akuntansi Pendanaan Teritorial dalam Pengakuan Keterbukaan Pengelolaan Pendanaan Daerah di Instansi Wilayah Bungin, Enrekang. Rezim.

Basri, YM (2001). Pemeriksaan Pemerasan di Badan Aset Daerah dari Sudut Pandang Segi Enam Misrepresentasi. Tenaga tugas Pendanaan dan Bisnis.

Damayanti, I. (2001). Analisis Kerangka Pengawasan Instansi dalam Kerangka Akuntansi Pejabat (Analisis Kontekstual pada Administrasi Surat-menyurat dan Informatika Pejabat Daerah Semarang). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 12 (1), 95-100. <https://doi.org/10.22225.kr.12.1.1852.95-100>

Febriana, Otot Lambung, dan Narastri, M. (nd). Pemeriksaan Penyampaian Pengakuan Rencana Pendanaan (Lra) untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pengeluaran.

Fitriyani, N., dan Herawati, H. (2001). Dampak Penerapan Prinsip Akuntansi Pejabat Berbasis Akumulasi, Kerangka Pengaturan Instansi dan Hakikat Penyampaian Pendanaan terhadap Penyampaian Tanggung Jawab Organisasi Pejabat (Analisis Kontekstual Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu). JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 2 (2), 19. <https://doi.org/10.32663.jaz.v2i2.989>

Guspul, A. (2001). Dampak Keterusterangan, Keterampilan, Kerangka Pengaturan Instansi, dan Tanggung Jawab Otoritatif terhadap Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Pengawasan Penunjukan Aset Daerah (Studi Eksperimental Seluruh Daerah di Kawasan Mrebet, Bagian Purbalingga). 1 (1).

Hamta, SE, M.Sc., F. (2001). Strategi penelitian pembukuan. Deepublis.

Herlina, R., Taufik, T., dan Nasir, A. (2001). Dampak Keterusterangan, Kemampuan, dan Kerangka Akuntansi Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Administrasi Pendanaan Daerah dengan Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Instansi Pejabat sebagai Variabel Pengarah. Jurnal Pendanaan, Bisnis dan Akuntansi (COSTING), 4 (2), 419-433. <https://doi.org/10.31539.costing.v4i2.1965>

Hidayat AA (2001). Makna fungsional kerangka pengaturan dan hakikat pertunjukan terhadap pertanggungjawaban.

Ikriyati, T., dan Aprila, N. (2009). Dampak Pelaksanaan Norma Akuntansi Pejabat, Pelaksanaan Kerangka Data Administrasi Provinsi, dan Kerangka Kontrol Instansi Pejabat terhadap Sifat Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah Rezim Seluma. Jurnal Akuntansi, 9 (2), 131-140. <https://doi.org/10.33369.j.akuntansi.9.2.131-140>

bunga lili Puspitawati dan Mega Marisa Effendy. (2002). Penelitian Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Moneter (Studi pada Satuan tugas Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Daerah Bandung).

Mita, NK (2001). Dampak Legalisme, Kelayakan Diri Individu, dan Kelayakan Kerangka Pengaturan Instansi terhadap Kecenderungan Merugikan Akuntansi (Studi Eksperimental pada LPD di Daerah Gianyar).

- Nena , AFD (2001). Pengujian Kerangka Data Akuntansi dalam Pengelolaan Pengaturan Istanis atas Penagaran di Klinik Hermana - Lembean .
- Sembilan Asniar Ridzal . (2001). Hubungan Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan di Badan Pengelola Pendanaan dan Sumber Daya Manusia Provinsi (BPKAD) Bagian Buton. Rezim.
- Putri , PAY, dan Endiana , IDM (2001). Dampak Kerangka Data Akuntansi dan Kerangka Pengaturan Istanis terhadap Pelaksanaan Organisasi (Analisis Kontekstual Koperasi di Daerah Payangan). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 11 (2), 179-189. <https://doi.org/10.22225.kr.11.2.1433.179-189>
- Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001a). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istanis, Tugas Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Alokasi Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. <https://doi.org/10.24036.jea.v3i4.415>
- Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001b). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istanis, Pekerjaan Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Penugasan Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. <https://doi.org/10.24036.jea.v3i4.415>
- Rumagit , FC, dan Mawikere , DLM (nd). Peangkaan Penagaran Perlakuan Akuntansi LO Sesuai Norma Akuntansi Pejabat (SAP) Peraturan Urutan 71 Masa 2001 pada Istanis Penagaran Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
- Sari, D. (2001). Dampak Kerangka Pengaturan Istanis Pejabat, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Pejabat, Tujuan Temuan Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pokok Administrasi Pejabatan yang Baik (Eksplorasi pada Bangsa-bangsa Tetangga di Wilayah Jawa Barat dan Banten).
- Siahaan , SB, dan Simanjuntak , A. (2001). Dampak Penggunaan Kerangka Data Moneter Provinsi, Pemahaman Norma Akuntansi Pejabat, dan Kerangka Pengaturan Istanis Pejabat terhadap Hakikat Penyampaian Moneter. Tenaga tugas Pendanaan, Methodist College of Indonesia.
- Sugiyono . (2001). Teknik Eksplorasi Kuantitatif dan Subjektif .
- Universitas PGRI Madiun , Madiun , dan Juliyanti , W. (2003). Tanggung Jawab Publik dan Pengungkapan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah (LKPD) di Indonesia. Akuntansi, Pendanaan Pejabat, dan Audit Bisnis, 3 (1), 1-17. <https://doi.org/10.35912.rambis.v3i1.2006>
- Widyatama , A., dan Lola, N. (2001). Dampak Kerangka tugas Kemampuan dan Pengaturan Istanis terhadap Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah.
- Wiwi Idawati dan Lia Eleonora . (2001). Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istanis dan Tanggung Jawab Moneter dalam Memahami Sifat Penyampaian Moneter .